

PEMBERDAYAAN PETANI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DI KAWASAN AGRO WISATA KECAMATAN BUNGA RAYA TAHUN 2017-2018

Oleh : Romulus Sitorus

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP.

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

The agricultural and tourism sectors play a strategic role in the development of the national economy. Not only as a provider of foodstuffs, industrial raw materials, feed, labor absorbers, sources of livelihoods and sources of foreign exchange, agriculture and tourism also serves as a driver of regional development and at the same time a driver of populist economic development.. These strategic roles are in line with the national economic development goals of improving the welfare of Indonesians, accelerating economic growth, reducing poverty, providing jobs, and maintaining the balance of natural resources and the environment. Seeing the condition of Indonesian people who are mostly agrarian people and also many interesting tourist attractions so that potentially in the economic development of the community one of them, by showing by most of their income comes from agriculture such as food crops and plantations.

Community empowerment is an effort to develop the independence and welfare of the community by improving knowledge, attitudes, skills, behaviors, abilities, awareness, and utilizing resources through the determination of policies, programs, activities, and mentoring in accordance with the essence and priority of community needs. The formulation taken is How empowerment is done by the Siak District Government in empowering farmers who are in the agrotourism area of Bunga Raya Subdistrict in 2017-2018 and What is an inhibitory factor in empowering farmers in Bunga Raya Subdistrict.

The purpose of this research is the first to find out the empowerment conducted by the Siak Regency Government to farmers who are in the agrotourism area in 2017-2018. To know the inhibitory factors in empowering farmers in Bunga Raya Subdistrict. The research method used is Qualitative Research. This type of research is Descriptive Qualitative Location of this research in the Department of Agriculture Siak and agricultural areas Bunga Raya District. Data collection techniques by means of Interviews, Observations or observations and documentation studies. Data analysis techniques by qualitative descriptive method.

The results of the research showed that in empowering farmers in Bunga Raya Subdistrict there are several ways that create the potential of the community Allows it to develop, Strengthen the potential of the community (Empowering) and To Prevent the Weak From Getting Weaker (Protecting). The factors that hinder farmers are divided into two, namely: There is no follow-up from the Government, especially the tourism office in conducting training on farmers living in agrotourism areas, the absence of guaranteed capital budgets to government farmers who are less able to bridge between farmers and buyers. External inhibitory factors Lack of activeness farmers in following the counseling conducted by the government through extension workers.

Keywords: *Empowerment of farmers, agrotourism areas, agricultural sector, enabling, protecting, empowering.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembedayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan Pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mewujudkan kemandirian masyarakat

Bidang Pertanian dan pariwisata merupakan urusan pemerintah Konkuren yang artinya urusan pemerintah yang dibagi atas Pemerintah Pusat/Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten. Peran Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian dan pariwisata merupakan urusan pemerintah Konkuren yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 3 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi: Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi Pertanian dan Pariwisata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dalam memberdayakan petani yang berada di kawasan agrowisata Kecamatan Bunga Raya tahun 2017-2018?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan petani yang berada di Kecamatan Bunga Raya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak terhadap petani yang berada di kawasan agrowisata tahun 2017-2018 .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan petani yang berada di Kecamatan Bunga Raya.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis yaitu hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan kajian di Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

2. Manfaat Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat di daerah Bunga Raya untuk mengetahui pandangan dan proses yang terjadi pada Pemberdayaan Petani dan faktor-faktor penghambat dalam dalam Pemberdayaan Petani

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan Petani

World Bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani memberikan suara atau menyuarakan pendapat, ide, gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan)¹.

¹ Totok Mardikanto, Soebiato Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif*

2. Kawasan Agrowisata

Agrowisata dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro(agribisnis) sebagai objek hubungan usaha di bidang pertanian dengan tujuannya yaitu untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha pertanian dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani sambil melestarikan sumber daya lahan serta memelihara budaya maupun teknologi lokal².

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak

Pemerintah Kabupaten yaitu suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Bupati yang memiliki wewenang sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dimana kewajiban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian dan sebagainya. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Organisasi yang berada yang memiliki wewenang untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat baik di bidang pertanian guna untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas petani yang masih lemah dengan tujuannya untuk menciptakan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah menjadi penentu dalam pemberdayaan masyarakat pertanian. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus bertanggungjawab atas berlangsungnya roda pemerintahan serta roda pembangunan dalam menentukan keberhasilan program pemberdayaan

pertanian tersebut. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari berjalannya fungsi dan peran sesuai dengan tugas pokok dengan wilayah kerjanya masing-masing sehingga program pemberdayaan Masyarakat Petani berjalan dengan lancar.

A. Menciptakan potensi masyarakat Memungkinkan bisa berkembang (Enabling)

1. Bidang pertanian

a. Program peningkatan tanaman pangan

Pada program ini Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menggelontarkan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 198.691.250. Dana tersebut tentunya lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 20.270.000. Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp 196.837.721 atau 99,07% dengan sisa anggaran Rp1.853.529. untuk tahun 2017 Realisasi anggaran hanya sebesar Rp 19.430.000 atau 95,85% dengan sisa anggaran 840.000.

b. Peningkatan kelembagaan petani

Pada tahun 2017, Dinas Pertanian Kabupaten Siak telah menyiapkan anggaran untuk program peningkatan kelembagaan pertanian. Anggaran program ini pada DPPA Tahun 2018 untuk mendukung sasaran strategis sebesar Rp 76.415.000 atau 0,48% dari anggaran Dinas Pertanian tahun 2017. Realisasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 38.801.500 atau hanya terserap sebesar 50,78% dari anggaran yang sudah disiapkan.

Pada tahun 2018, anggaran untuk program ini menurun dari tahun sebelumnya. Anggaran program ini pada DPPA Tahun 2018 untuk mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 61.020.000,- terealisasi Rp. 45.217.000,- dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 74,10 % dari total yang sudah dianggarkan.

Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2015, Hlm. 28.

² Utama Gusti Dan Junaedi, *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2015), Hlm 85.

**c. Program pemberdayaan
Penyuluh
pertanian/perkebunan
lapangan**

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Siak sudah menganggarkan pada DPPA untuk program ini yang bertujuan untuk mendukung sasaran strategis sebesar Rp 109.450.000 atau 1,45% dari seluruh anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Siak. Anggaran yang terealisasi untuk program ini sebesar Rp 95.210.610 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 86,99 % dari yang sudah dianggarkan.

Begitu juga pada tahun 2018, anggaran untuk program ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Anggaran program ini pada DPPA Tahun 2018 untuk mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp 231.992.500 atau setara 2,58% dari seluruh anggaran Dinas pertanian Kabupaten Siak. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 216.847.000 dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 93,47 % dari seluruh anggaran.

2. Bidang Agrowisata

Berdasarkan wawancara dengan Arif Budiman selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mengatakan:

”belum ada anggaran dari pemerintah daerah untuk melakukan pelatihan seperti pelatihan ekonomi kreatif terhadap pengelola agrowisata yang pada dasarnya petani sehingga pengelola agrowisata tidak terberdayakan oleh dinas pariwisata” (Wawancara pada tanggal 23 Juli 2019)

Sementara dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 dalam pasal 14 huruf K bahwa tugas dari Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas yaitu

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia. Namun karena belum ada anggaran dari pemerintah daerah untuk dinas pariwisata untuk melakukan pendidikan dan pelatihan maka petani yang tinggal di kawasan agrowisata tidak terberdayakan oleh Dinas Pariwisata.

B. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (Empowering)

1. Peningkatan Taraf Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Siak juga telah menyiapkan program pendidikan untuk petani yang ada di Kabupaten Siak. Program pendidikan petani tersebut tentunya langsung diserahkan ke tim penyuluh untuk membina petani dan memberi inovasi terbaru di bidang pertanian. Berdasarkan wawancara dengan penyuluh kampung Bunga Raya Bapak Nasir Nasidi, Amd

“Pemberdayaan yang di lakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam mengelola lahan yang baik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Siak khususnya Dinas Pertanian pada Tahun 2017-2018 yaitu Dinas Pertanian memberikan Penyuluh disetiap Kecamatan untuk mendampingi petani untuk melakukan pendidikan seperti di lakukan pertemuan untuk melakukan sosialisasi dan juga solusi bagi petani yang memiliki kesulitan. Pertemuan terhadap penyulu di lakukan secara temporer atau ketika petani mengalami kesulitan”. (wawancara pada tanggal 8 Maret 2020)

2. Sumber-Sumber kemajuan ekonomi

a. Modal

Modal usaha merupakan hal yang paling penting yang harus dimiliki petani

untuk memajukan hasil pertaniannya. Untuk saat ini para petani Kabupaten Siak untuk memperoleh dana awal dari Kredit usaha rakyat (KUR) yang bekerjasama langsung antara masyarakat dengan Bank. Bank yang akan mensurvei langsung keadaan dilapangan

b. Teknologi

. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukarimi, S.P selaku Kabid sarana prasarana menuturkan

“Dinas pertanian dalam melakukan pemberdayaan terhadap petani yaitu dengan memberikan bantuan alat pertanian serta memberikan pelatihan terhadap penggunaannya. Dengan bantuan alat mesin pertanian tersebut maka petani lebih mudah dan cepat dalam mengelolah pertaniannya” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2020)

c. Pasar

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budiman, S.P selaku seksi penyuluh terkait tidak ada monitoring terhadap penjualan hasil produksi padi petani di pasaran, beliau menuturkan hasil

“pertanian tersebut dijual kepada tengkulak. Harga dari tengkulak terkadang tidak stabil dan terkadang dibawah harga pasar. Maka Pemberdayaan pemerintah khususnya dinas pertanian dalam membantu masyarakat untuk menampung hasil pertanian tidak ada sehingga masyarakat menjual sendiri hasil pertaniannya kepada tengkulak”. (Wawancara pada tanggal 8 maret)

C. Untuk Mencegah Yang Lemah Bertambah Lemah (*Protecting*)

1. Peningkatan kemampuan lembaga pertanian

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, sehingga mampu meningkatkan kualitasnya dalam pembinaan petani melalui penggalan data dan informasi yang dilakukan bersama-sama dengan tokoh dan anggota masyarakat guna menjangkau kebutuhan nyata, harapan dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif secara berkelanjutan guna menunjang ketahanan pangan masyarakat yang ditandai dengan pencapaian sasaran seperti :

1. Penyusunan program desa/kelurahan dimulai dengan penggalan data dan informasi mengenai potensi desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan tingkat produktivitasnya.
2. Informasi mengenai keberadaan kelompok tani (POKTAN)/Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Kecamatan Bunga Raya sudah terdata dengan baik sehingga Penyulu Pertanian Lapangan(PPL) tidak sulit lagi untuk melakukan monitoring di setiap kelembagaan petani. Wawancara bersama Bapak Nasir Rasidi selaku PPL Kecamatan Bunga Raya “untuk saat ini Kecamatan Bunga Raya memiliki 10 Gapoktan dan 93 kelompok tani dan 2.667 anggota.

2. Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis

. Pelatihan terhadap petani yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian yaitu pelatihan terhadap

bagaimana penggunaan alat mesin dengan inovasi-inovasi baru. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budiman, S.P selaku seksi penyuluh.

“pelatihan ini sering kami adakan jika ada teknologi baru atau ada produk terbaru dari dinas pertanian. Pelatihan ini berguna untuk memahami terlebih dahulu para petani untuk tentang produk ataupun teknologi terbaru. Selain pelatihan ini juga untuk menambah pengetahuan dalam pertanian, seperti ngolah tanah, nanam padi baik dan cepat atau pun pemilihan bibit yang baik sehingga menghasilkan produksi yang maksimal.. (Wawancara pada tanggal 8 maret)

3. Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Petani dan Pelaku Agribisnis

Penyuluh dan pendamping petani di Kabupaten Siak sudah ada dan sangat membantu petani dalam memberikan solusi maupun inovasi. Namun keterbatasan penyuluh dan pendamping saat ini menjadi hambatan dan tugas besar bagi pemerintah Kabupaten Siak. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Rekomendasi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang yaitu Penambahan jumlah penyuluh khususnya PPL yang berstatus PNS dimana penyuluh yang ada sekarang hanya berjumlah 46 orang dan masih terdapat kekurangan sebanyak 85 orang, Peningkatan koordinasi antar lembaga lain seperti litbang pertanian, perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat, dimana para penyuluh dapat menggunakan hasil penelitian dari lembaga tersebut untuk meningkatkan produktivitas, dan Pelatihan peningkatan SDM Penyuluh yang anggarannya diperoleh dari APBN Pusat.

D. Faktor penghambat dalam melakukan pemberdayaan petani yang berada di Kecamatan Bunga Raya.

Merujuk pada kondisi yang terjadi , peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisa kekurangan dan juga hambatan yang terjadi dalam program pemberdayaan petani di kawasan Agrowisata. Faktor penghambat disini akan dibahas yang menyangkut faktor penghambat internal dan eksternal, yaitu:

1. Faktor Penghambat Internal

a. Tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dalam melakukan pelatihan terhadap para petani yang tinggal di kawasan agrowisata.

Kawasan pertanian yang ada di Kecamatan Bunga Raya ada sebagian dijadikan objek wisata oleh masyarakat sekitar. Namun, dalam pengelolaannya, belum mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah, khususnya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Berdasarkan wawancara dengan petani Kampung Bunga Raya bapak Raswar (petani) menuturkan

“memang benar dilahan pertanian daerah sini ada dijadikan tempat wisata, ada tempat bermain dan banyak orang datang untuk berfoto-foto. Kalau bantuan tidak ada dari dinas pariwisata, semuanya dikelola oleh masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 8 maret).

b. Tidak adanya jaminan anggaran permodalan terhadap petani.

Pemerintah Kabupaten Siak belum mampu memberikan modal tunai kepada para petani untuk menunjang kebutuhan pertanian di awal penanaman. Pemerintah hanya bisa memberikan bantuan berupa alat

kelengkapan petani dan bantuan pupuk maupun racun. Sehingga petani yang ada di Kecamatan Bunga Raya mencari modal awal dari pinjaman pada tengkulak. berdasarkan atas hal ini, tentunya memberatkan bagi para petani untuk mengembangkan lahan pertanian mereka. **Pemerintah yang kurang mampu menjembatani antara petani dan pembeli.**

Pemasaran hasil pertanian yang ada di Bunga Raya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak. tengkulak tersebut ada yang membeli hasil pertanian dengan harga standart ada juga dibawah standart. Keharusan petani menjual ke tengkulak adalah sebuah keharusan karena tengkulak sudah membantu modal awal petani di Bunga Raya. Hal ini diketahui dari wawancara dengan beberapa Petani yang ada di Kecamatan Bunga Raya mengatakan

2. Faktor Penghambat Eksternal

ketua Gapoktan yang berada di Kecamatan Bunga Raya yaitu Bapak Sukarno menuturkan bahwa

“Dalam melakukan penyuluhan ataupun pertemuan yang dilakukan terhadap petani dalam meningkatkan hasil panen, banyak petani yang tidak mengikuti. Beliau juga menuturkan bahwa dalam satu kelompok tani yang beranggotakan 40 orang ternyata dalam melakukan program penyuluhan yang hadir paling banyak 15 orang hal ini di sebabkan kurangnya ketertarikan petani itu sendiri sehingga program pemerintah tidak terlaksana dengan maksimal”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya tidak semua petani yang aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui

penyuluh. Seharusnya petani harus aktif dalam setiap kegiatan, hal ini dikarenakan kegiatan ini murni untuk kemajuan untuk petani yang ada di Bunga Raya. Diketahui dari 40 anggota petani yang ada, paling banyak hanya ada sekitar 15 orang petani yang hadir dalam pelatihan. Semakin cerdas petani dalam mengelola lahan pertanian maka semakin bagus pula hasil pertanian yang dihasilkan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, Dinas Pertanian Kabupaten Siak sudah berbagai upaya dalam memberdayakan petani yang ada di Kabupaten Siak dengan menjalankan perannya sebagai instansi pemerintahan. Maka kesimpulan mengenai pembahasan di bab sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (Enabling).

Dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*), pemerintah Kabupaten Siak sudah menjalankannya dengan baik dengan cara menjalankan program dan menganggarkan uang untuk menjalankan program tersebut. Walaupun pelaksanaan program belum mencapai 100%, namun dapat disimpulkan seluruh program yang berkaitan dengan sub tersebut berjalan dengan baik.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (Empowering)

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), pemerintah kabupaten Siak sudah menjalankan dengan menjalankan programnya dengan baik, walaupun ada beberapa poin seperti modal dan penyediaan

pasar bagi petani belum dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga petani dalam mencari modal dan pasar untuk menyalurkan hasil pertaniannya harus pergi ke agen atau tengkulak. Oleh karena itu pada sub poin ini harus dimaksimalkan kembali.

3. Untuk Mencegah Yang Lemah Bertambah Lemah (*Protecting*)

Untuk mencegah yang lemah bertambah lemah, pemerintah sudah memberikan solusi dengan cara mengadakan penyuluh atau pendamping lapangan petani. selain itu dapat diketahui juga, pemerintah Kabupaten Siak sudah memberi pengetahuan dengan cara pelatihan baik untuk penyuluh maupun petani.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis memberi saran berupa:

1. Pemerintah Kabupaten Siak harus menyediakan pasar untuk menampung seluruh hasil petani, sehingga hasil petani bisa didistribusikan dengan baik dan petani akan cepat menikmati hasil pertaniannya.
2. Pemberian modal dari pemerintah kepada petani yang bersifat tunai. Pemberian dana langsung tunai ini untuk menghindari petani berhutang kepada Bank atau tengkulak.
3. Dalam memberi bantuan, pemerintah Kabupaten Siak harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan, karena alat yang diberikan belum tentu bisa maksimal digunakan ketika lapangan.
4. Untuk petani, diharapkan jika ada inovasi baru atau pelatihan, selalu mengikuti dan menghadiri, karena semua yang diberikan melalui pelatihan tersebut akan berguna untuk kemajuan petani di Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Anwar, Khairul Dan Zainal Abidi. 2017. *Partisipasi Sosial Dan Politik*. Pekanbaru: UR Press.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberd Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz Ali, Sauhartini Dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodolgi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan masyarakatdalam persfektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Umar, Husein. 2005. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Bersama
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Bersama.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press(HUP)

Jurnal

- Langi, jova jalinsri engelina. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Di Desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan), jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Parawangi, anwar, ahmar dkk. 2015. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak

Peraturan Bupati Siak Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

Dokumen lainnya

LAKIP Dinas Pertanian tahun 2017 dan 2018
RENJA Dinas Pertanian tahun 2018
Renstra tahun 2016-2021 Dinas Pertanian Kabupaten Siak dalam angka 2019
Kecamatan Bunga Raya dalam angka 2019